

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Setiap perusahaan publik memiliki kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangannya di Bursa Efek Indonesia (BEI). Laporan keuangan yang dipublikasikan tersebut dapat dilihat oleh seluruh bagian eksternal perusahaan seperti investor, kreditor, dan masyarakat. Laporan keuangan perusahaan dipublikasikan merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan menyediakan informasi yang terpercaya dan tidak menyesatkan mengenai operasional di dalam perusahaan. Laporan keuangan perusahaan juga memiliki tujuan agar segala informasi operasional perusahaan dapat dilihat oleh pihak eksternal dalam bentuk laporan posisi keuangan, laba rugi, dan arus kas perusahaan.

Informasi mengenai perusahaan yang disediakan dalam laporan keuangan perusahaan dapat menjadi alat penilaian mengenai kinerja perusahaan bagi internal maupun eksternal perusahaan (Wicaksono dan Chariri, 2017). Pihak eksternal dapat menggunakan informasi dalam laporan keuangan menjadi dasar pengambilan keputusan, contohnya merupakan dasar pengambilan keputusan bagi investor dan kreditor. Alasan pengambilan keputusan oleh pihak eksternal tersebut menyebabkan pihak internal untuk berkerja sebaik mungkin untuk menyediakan hasil operasional perusahaan yang terbaik melalui laporan keuangan perusahaan tersebut. Usaha pihak internal untuk menghasilkan laporan keuangan perusahaan yang menarik bagi pihak eksternal terkadang menyebabkan tindakan manipulasi informasi atau data dalam laporan keuangan perusahaan. Tindakan manipulasi dapat dikatakan sebagai kecurangan laporan keuangan apabila informasi dalam laporan keuangan tersebut tidak handal dan menyesatkan bagi pihak eksternal.

*The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* merilis *Report to the Nation (RTTN)* tahun 2016 menyatakan bahwa proporsi kecurangan yang dikarenakan manipulasi laporan keuangan perusahaan mengalami peningkatan sebesar 2%, dari tahun 2012 yang sebesar 7,6% menjadi 9,6% pada tahun 2016 (Widodo dan Syafrudin, 2017). Widodo dan Syafrudin (2017) juga menyatakan

kerugian yang disebabkan kecurangan laporan keuangan adalah sebesar \$975,000. Angka kerugian sebesar \$975,000 merupakan nilai rata-rata dari setiap kasus kecurangan laporan keuangan yang berasal dari hasil *Global Fraud Survey* 2015, survei online yang disebar oleh ACFE dan menggunakan 2.410 respon survei untuk menghasilkan laporan tersebut.

Pihak internal melakukan tindakan manipulasi dalam laporan keuangan yang disebut sebagai manajemen laba dengan tujuan agar investor dapat melakukan investasi yang besar kepada perusahaan tersebut, dan/atau kreditor memberikan pinjaman kepada perusahaan. Manipulasi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Seperti contohnya adalah mencatat nilai aset, pendapatan, dan laba terlalu tinggi, dan merendahkan nilai kewajiban, biaya, dan kerugian. Cara tersebut dilakukan untuk meningkatkan laba perusahaan sehingga laporan keuangan perusahaan dapat terlihat baik di mata pihak eksternal. Selain itu, terdapat cara lain yaitu dengan cara meningkatkan beban perusahaan tahun sekarang, dan/atau menahan jumlah laba tahun sekarang dan kemudian menampilkannya di tahun berikutnya. Cara tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan laba perusahaan yang terlalu tinggi di tahun operasional perusahaan yang berjalan dengan lancar, untuk membantu tahun selanjutnya yang kemungkinan kegiatan operasional perusahaan tidak akan berjalan dengan lancar (ACFE, 2013).

Kecurangan dalam laporan keuangan telah terjadi di perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia. Seperti yang dilakukan oleh PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutimin Indonesia, dilaporkan oleh Indonesia Corruption Watch (IWC) bahwa dua perusahaan tersebut telah melakukan manipulasi dalam pelaporan penjualan (Rahmayanti, 2018). PT. Kimia Farma, Tbk juga diduga melakukan kecurangan yaitu menaikkan jumlah laba bersih perusahaan sebesar Rp 32.668 Milyar dalam laporan keuangan perusahaan tahun 2001. Kecurangan yang dilakukan dalam laporan keuangan tersebut dapat menyebabkan pihak eksternal seperti investor dan kreditor mengambil keputusan yang sangat merugikan bagi mereka tetapi sekaligus menguntungkan perusahaan.

Perusahaan-perusahaan yang telah disebutkan sebelumnya dapat melakukan kecurangan alasan lainnya adalah dikarenakan manajemen dalam perusahaan ingin menguntungkan dirinya sendiri. Manajemen dapat dengan mudah melakukan kecurangan karena manajemen memiliki pengetahuan lebih dalam tentang perusahaan dan telah terbiasa dengan kegiatan operasional perusahaan. Berdasarkan penelitian Dechow, Sloan, dan Sweeney (1996 dalam Tiffani dan Marfuah, 2015) dan membuktikan bahwa dengan tingkat kecurangan perusahaan yang tinggi dikarenakan perusahaan tersebut memiliki tingkat *corporate governance* yang rendah. Hasil penelitian yang didapatkan oleh Dechow, dkk (1996) dapat disimpulkan bahwa tindakan kecurangan (*fraud*) dalam laporan keuangan perusahaan dapat terjadi karena kurangnya pengawasan dan pengendalian internal yang efektif dalam pihak internal perusahaan atau *corporate governance* perusahaan yang terkait. Menurut ACFE (2013), perusahaan memiliki berbagai alasan untuk melakukan kecurangan laporan keuangan, tetapi alasan utama dari melakukan kecurangan merupakan menguntungkan perusahaan atau manajemen sendiri.

*Corporate governance* merupakan sistem dalam perusahaan yang mengawasi dan menjaga perusahaan agar tidak melanggar peraturan dan hukum yang berlaku dalam melakukan kegiatan operasional dalam perusahaan dan menyediakan informasi yang terandalkan bagi pihak eksternal yang menggunakan laporan keuangan perusahaan (Widodo dan Syafrudin, 2017). Kecurangan yang terjadi dalam perusahaan dapat diminimalisir apabila perusahaan memiliki *good corporate governance* (GCG), yang dapat tercapai apabila mengikuti prinsip-prinsip yang dicetuskan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), responbilitas (*responbility*), independensi (*independency*), dan kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) (Fadhilah, 2014, dalam Christian, 2018). Mekanisme dari *corporate governance* wajib mematuhi prinsip-prinsip GCG tersebut agar kecurangan dalam laporan keuangan dapat terminimalisir dan operasional perusahaan berjalan tanpa masalah.

*Corporate governance* dalam penelitian ini merupakan komite audit, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional. Komite audit memiliki peran untuk melakukan pengawasan terhadap operasional perusahaan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 yang menjelaskan bahwa perusahaan publik atau perusahaan yang terdaftar di BEI memiliki kewajiban untuk membentuk komite audit yang independen dan setidaknya salah satu anggota dari komite audit tersebut memiliki keahlian keuangan (OJK, 2015). Maka dari peraturan tersebut diharapkan komite audit dapat melakukan tugasnya dengan baik sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kecurangan dalam kegiatan operasional perusahaan terutama dalam pencatatan laporan keuangan perusahaan. Komite audit memiliki tanggung jawab mengenai kebijakan akuntansi dalam perusahaan, kepatuhan akan peraturan, dan pengawasan sehingga dengan adanya komite audit, kecurangan laporan keuangan dapat berkurang. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono dan Chariri (2015) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Selain itu, Widodo dan Syafruddin (2017) juga menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramdhani dan Yuyetta (2017) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.

Rezae (2007, dalam Prasetyo, 2016) menyatakan bahwa kegiatan pengawasan dijalankan oleh dewan komisaris. Dewan komisaris melakukan pengawasan dengan tujuan agar manajemen dalam perusahaan melakukan tugasnya sesuai dengan harapan dan kepentingan pemegang saham. Di dalam dewan komisaris juga terdapat dewan komisaris independen yang anggotanya berasal dari eksternal perusahaan, sehingga dapat dewan komisaris menjalankan tugasnya secara independen dan objektif. Dengan adanya dewan komisaris independen, maka tugas pengawasan akan berjalan dengan efektif dikarenakan dewan komisaris tidak memiliki kepentingan secara langsung terhadap perusahaan maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen dapat

mengurangi kecurangan laporan keuangan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Chtourou (2001), Nasution dan Setiawan (2007), dan Razali dan Arshad (2014) yang memberikan hasil bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono dan Chariri (2015) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Kepemilikan institusional merupakan suatu kepemilikan perusahaan yang dimiliki oleh entitas lain seperti contohnya adalah lembaga keuangan (bank), asuransi, dan perusahaan investasi (Tarjo, 2008). Kepemilikan institusional memiliki kepentingan dalam perusahaan maka dari itu dengan semakin banyaknya pihak institusional yang berinvestasi dalam perusahaan maka akan meningkatkan pengawasan dan pemantauan yang tinggi atas penggunaan dana investasi dalam perusahaan (Rice, 2013). Peningkatannya pengawasan yang dilakukan maka menyebabkan manajemen akan berhati-hati dalam melakukan kegiatan operasionalnya, dengan begitu kemungkinan kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan akan sangat kecil. Kepemilikan institusional dapat disimpulkan berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan sejalan dengan hasil penelitian oleh Rahmayanti (2012, dalam Rice, 2013) dan Rahmadhona (2010, dalam Rice, 2013) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Tetapi, pernyataan tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.

Kecurangan laporan keuangan perusahaan bisa juga terjadi dikarenakan karakteristik perusahaan. Karakteristik yang akan dibahas disini merupakan ukuran perusahaan dan tingkat pertumbuhan perusahaan. Ukuran perusahaan berhubungan dengan tingkat perhatian pihak eksternal yaitu investor dan kreditor terhadap perusahaan tersebut. Semakin meningkatnya ukuran perusahaan maka tingkat perhatian pihak eksternal atas kinerja operasional perusahaan akan meningkat, dengan meningkatnya perhatian dari investor dan kreditor terhadap

perusahaan maka manajemen perusahaan akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan dalam laporan keuangan perusahaan. Keberhati-hatian tersebut dapat menurunkan tingkat kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan. Ukuran perusahaan dapat disimpulkan berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan, sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saffudin dan Prasetiono (2012) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nangsaptiti (2010) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Selain itu, Prasetyo (2016) juga memiliki hasil penelitian yang berbeda yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.

Kecurangan akan laporan keuangan ini juga berhubungan dengan pertumbuhan perusahaan, dikarenakan disaat keadaan operasional perusahaan mengalami penurunan, maka manajemen perusahaan akan berusaha agar penjualan perusahaan mengalami peningkatan atau tercapai dengan target (Healy, 1985, dalam Scott, 1931:427). Cara manajemen meningkatkan penjualan perusahaan adalah dengan melakukan pemilihan metode akuntansi oleh manajemen yang dapat meningkatkan atau memaksakan laba perusahaan sesuai dengan target maka manajemen akan mendapatkan bonus dari pencapaian target tersebut (Prasetyo, 2016). Pertumbuhan perusahaan dapat disimpulkan berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan sejalan dengan hasil penelitian oleh Owens-Jackson, Robinson, dan Shelton (2009). Berbeda dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Hapsari (2014), Nugraha dan Henny (2015), dan Nabila (2013) yang menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.

Penelitian ini akan membahas pengaruh *corporate governance* yaitu komite audit, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional, dan pengaruh karakteristik perusahaan yaitu ukuran perusahaan dan tingkat pertumbuhan terhadap kecurangan laporan keuangan. Objek yang digunakan

dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017. Perusahaan manufaktur dipilih karena memiliki kegiatan operasional yang tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan jasa maupun perusahaan dagang, sehingga lebih rentan atas kecurangan dalam laporan keuangan.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
- b. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
- c. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
- d. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
- e. Apakah tingkat pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Melihat perumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap kecurangan laporan keuangan.
- b. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dewan komisaris independen terhadap kecurangan laporan keuangan.
- c. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap kecurangan laporan keuangan.
- d. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap kecurangan laporan keuangan.

- e. Untuk menguji dan menganalisis tingkat pertumbuhan perusahaan terhadap kecurangan laporan keuangan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis dan praktis. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai komite audit, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, tingkat pertumbuhan, dan kecurangan laporan keuangan. Dan juga memberikan pengetahuan mengenai pengaruh komite audit, dewan komisaris independe, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, tingkat pertumbuhan terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil dari penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

- b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi investor dan kreditor sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi atau memberikan kredit kepada perusahaan.

#### **1.5 Sistematika Penulisan Proposal Skripsi**

Proposal skripsi terdiri dari 5 bab, yaitu

##### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab satu akan diuraikan menjadi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika proposal skripsi.

##### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Bab dua akan menjelaskan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan kerangka penelitian.

##### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Bab tiga akan menjelaskan mengenai desain penelitian, identifikasi, definisi operasional, pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel dan teknik penyampelan, dan analisis data



yang digunakan dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya.

#### **BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil analisis data, dan pembahasan.

#### **BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan dalam penelitian, dan saran-saran yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan.